

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

B. Hasil

2. Bengkulu Abad ke 18 dan ke 19

a. Letak dan Keadaan Geografis Wilayah Bengkulu

Provinsi Bengkulu semula merupakan suatu karisidenan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sejak tanggal 18 November 1968 diresmikan menjadi Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan merupakan Provinsi ke-26 di Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 9 tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1968. Termasuk pula dalam wilayah Provinsi Bengkulu yaitu Pulau Enggano, Pulau Tikus dan Pulau Mega. (Dinas P dan K, 1984)

Secara geografis Provinsi Bengkulu terletak pada 101' 01" dan 103' 41" Bujur Timur serta 20' 16" dan 3' 31" Lintang Selatan dengan ketinggian dari permukaan laut 0-20 m (Bengkulu) sampai dengan 627-733 (Curup). Provinsi ini terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan, di antara Bukit Barisan di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dengan luas wilayah lebih kurang 21.089,38 km² atau 2.108.938 ha dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan,

sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dari luas wilayah tersebut, diatas 63,1% merupakan lahan budidaya dan 36,9% merupakan lahan non-budidaya yang tetap dilestarikan sebagai kawasan lindung untuk konservasi yang tidak boleh diganggu dan diambil manfaatnya. (Dinas P dan K, 1984)

Pada awal berdirinya Provinsi Bengkulu terdiri dari satu Kotamadya dan tiga Kabupaten, saat ini dengan adanya pemekaran Provinsi Bengkulu memiliki sembilan Kabupaten/Kota. Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) Daerah Tingkat II, yaitu: 1) Kabupaten Muko-Muko; 2) Kabupaten Bengkulu Utara; 3.) Kabupaten Lebong; 4) Kabupaten Rejang Lebong; 5) Kabupaten Kepahiang; 6) Kabupaten Seluma; 7) Kabupaten Bengkulu Selatan; 8) Kabupaten Kaur; dan 9) Kota Bengkulu. (Dinas P dan K, 1984)

Jumlah penduduk saat ini mencapai kurang lebih 1,6 juta jiwa yang tersebar pada 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu. Suku-suku besar yang mendiami dan dan menjadi cikal bakal penduduk Propinsi Bengkulu adalah Suku Serawai, Suku Rejang, Suku Melayu, Suku Lemak, Suku Muku-muko, Suku Pekal, Suku Enggano. (Dinas P dan K, 1984)

Topografi Propinsi Bengkulu terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah Bagian timur daerah ini merupakan datataran tinggi dan pegunungan dengan udaranya yang sejuk nserta memeiliki berbagai fenomena alam yang unik dan menarik seperti Kawah Vulkanik yang dapat didekati, Air panas alam yang sangat baik

untuk kesehatan, Air Terjun, Danau, Telaga Tujuh Warna, Selain fenomena alam wilayah ini juga menjadi pusat sayuran dan buah-buahan serta Perkebunan teh yang terhampar seperti permadani hijau yang menyejukan. (Dinas P dan K, 1984)

b. Sejarah Keberadaan Inggris (EIC) DI Bengkulu

Perusahaan dagang Inggris, East India Compan(EIC). mencatat, perusahaan tersebut pernah berjaya pada era 1700-an. EIC yang menjalankan bisnis perdagangan pada masa kolonial di India sebenarnya telah dibubarkan pada 1874. Dulu, perusahaan tersebut didukung dengan modal yang kuat dan militer Inggris yang selalu membantu kelancaran dalam berbisnis.

EIC hanya bergerak di bidang penjualan kopi dan teh saja EIC merupakan nama yang melekat pada semua orang India. sejarah mencatat EIC memiliki beberapa catatan buruk di masa lalu. EIC mendapatkan jaminan untuk memonopoli perdagangan Inggris ke Asia. Hingga EIC memiliki militer dan pemerintahan yang mengontrol beberapa wilayah di India.

Wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Marau Riang. di bawah Kesultanan Banten, mereka menjadi daerah kekuasaan EIC. Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada dibawah kekuasaan Kerajaan Inderapura semenjak abad ke-17.

British East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada Bencoolen dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah Pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut.

Sejak dilaksanakannya Perjanjian London pada tahun 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik/Singapura dan Pulau Belitung). Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda.

Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad ke-19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Saat ini, kegiatan penambangan komersial telah dihentikan semenjak habisnya deposit.

Pada tahun 1930-an, Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan, termasuk Sukarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi provinsi ke-26 (termuda sebelum Timor Timur).

Bengkulu adalah sebuah provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Indonesia. Di masa lalu daerah ini pernah menjadi ajang persaingan dagang antara Inggris dan

Belanda. Mereka berusaha untuk menguasai komoditi (lada) yang ada di sana. Tahun 1664 Belanda dengan VOC-nya mendirikan kantor pelelangan di sana. Tahun 1670 Sultan Banten mengeluarkan peraturan transaksi lada yang baru. Peraturan itu membuat pihak Belanda mengalami kerugian. Untuk itu, pada tahun 1670 Belanda meninggalkan Bengkulu. Mereka pergi ke Banten dengan tujuan menguasainya. Di sana Belanda berhasil membuat Sultan Banten menandatangani perjanjian tentang hak monopoli perdagangan oleh Belanda. Perjanjian itulah yang kemudian membuat perhatian Belanda hanya tertuju pada Banten. Dan, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Inggris, melalui EIC-nya, untuk masuk ke Bengkulu. Pihak Bengkulu sendiri sebenarnya juga berkeinginan untuk mengadakan hubungan dagang dengan Inggris. Hal itu ditunjukkan dengan dikirimnya undangan untuk berdagang di wilayah tersebut kepada pusat perdagangan Inggris di Madras (India). Jadi, kedatangan Inggris di Bengkulu tidak hanya mendirikan bangunan pemerintahan, tetapi juga religi, hunian dan pertahanan. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh bangsa Inggris yang datang ke Bengkulu untuk membuat strategi pertahanan yaitu dengan salah satu cara mendirikan benteng untuk pusat pertahanan militer dan perdagangannya. (Dinas P dan K, 1982/1983)

Fort Marlborough dibangun oleh Kompeni India Timur (EIC) yaitu bangsa Inggris pada awal abad ke-18, atau tepatnya tahun 1714. Seperti halnya benteng-benteng asing lainnya di Timur, kehadiran Fort Marlborough menandai kepentingan dan kekuasaan Inggris di wilayah tersebut, yaitu pantai barat Sumatra di daerah Bengkulu. Pendirian benteng ini memiliki latar belakang dan hubungan yang erat dengan perkembangan kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi Inggris di

wilayah Indonesia khususnya Bengkulu. Setelah berhasil menegakkan kekuasaannya di Calcutta pada pertengahan abad ke-17, pandangan perdagangan Inggris diarahkan ke Asia Tenggara yang pada awal abad itu memberikan pengalaman pahit bagi para pedagangnya. Melalui saluran diplomatik dan pendekatan ekonomi, para petinggi EIC berhasil mendekati para kepala adat di pantai barat Sumatra khususnya mereka yang belum ditaklukkan atau yang masih berada di bawah kontrol pengaruh VOC. Ketika kekuatan VOC berkurang atau setidaknya dialihkan dari Sumatra (kecuali Padang yang dipertahankan oleh VOC untuk melindungi dari penetrasi para pedagang EIC yang tiba dari India) ke Jawa dan Sulawesi, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejabat EIC untuk memperkuat posisi dan pengaruh mereka di Sumatra. Benteng bangunan Inggris ini diberi nama menurut nama seorang jenderal Inggris terkenal pada awal abad ke-17, John Churchill Duke of Marlborough.

Jenderal Marlborough adalah panglima pasukan Kerajaan Inggris kepercayaan Ratu Anne yang dikirim sebagai pimpinan pasukan ekspedisi Inggris ke daratan Eropa. Pada periode yang hampir sama, akhir abad ke-17 permusuhan antara Inggris melawan Belanda dan Prancis juga dilancarkan di bagian dunia lainnya. Kondisi ini menyebar hingga ke Sumatra dan Jawa. Perebutan ruang pengaruh telah terjadi antara kongsi dagang EIC dan VOC di pantai barat Sumatra sejak pertengahan abad ke-17. Setelah Belanda berhasil menegakkan pengaruhnya pada tahun 1685 di Pariaman, beberapa pedagang Inggris mulai merasa perlu untuk mencari tempat yang layak sebagai pangkalan mereka. Tujuan mereka adalah untuk bisa membeli dan mengekspor lada dari Banten, mengingat lada dari Sumatra Barat tidak lagi mungkin dilepaskan dari monopoli Belanda. Mereka

meminta bantuan pangkalan EIC di Madras agar mengirimkan pasukan untuk menduduki sebuah tempat di antara Banten dan Sumatra Barat. Pada tahun 1686 EIC berhasil menguasai daerah Silebar, di dekat Bengkulu. Sejak itu Silebar dijadikan pangkalan oleh mereka demi kepentingan perdagangan lada.

Dari Silebar aktivitas perdagangan orang-orang Inggris mulai meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Mereka tidak lagi terbatas pada lada tetapi juga pada produk agraria dan hasil hutan yang lain. Pada tahun 1701 orang-orang Inggris ini telah mulai melakukan pelayaran menyusuri sungai Bengkulu untuk mengumpulkan produk hutan sampai ke pedalaman. Dari aktivitas ini, mereka mulai melakukan interaksi dengan penduduk yang bermukim mulai dari Ayer Bangis di dekat Padang sampai ke selatan Tallo, dekat Manna. Ketika transaksi perdagangan mereka semakin besar, para pejabat EIC di Calcutta menilai perlunya membangun suatu pangkalan di Bengkulu. Untuk itu mereka sepakat memilih sebuah lokasi yang tepat dengan tujuan tidak hanya strategis secara ekonomi tetapi juga mampu mengontrol wilayah sekitarnya. Hal ini penting tidak hanya untuk memperluas aktivitas ekonomi lebih lanjut tetapi juga untuk melindungi kepentingan Inggris di daerah Bengkulu.

Akhirnya pada tahun 1714 peletakan batu pertama pendirian pangkalan dimulai. Berdasarkan pertimbangan fungsi pangkalan tersebut, lokasi yang dipilih adalah dua atau tiga mil dari muara sungai Bengkulu dan berada di tepi pantai. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa muara sungai Bengkulu mengalami pengendapan lumpur sehingga sulit bagi kapal-kapal besar untuk merapat di dermaganya. Di samping itu, tanah yang dipilih terletak lebih tinggi daripada

sekitarnya sehingga bisa memantau semua wilayah tersebut. Dalam proses pembangunannya, para pejabat EIC meminta bantuan penduduk pribumi setempat. Pada tahun 1719 benteng Marlborough selesai dan berfungsi tidak hanya menjadi pusat pemukiman tetapi juga menjadi pangkalan pertahanan militer Inggris, khususnya untuk menghadapi ancaman orang-orang Belanda. Benteng ini dibuat dari batu karang yang dikelilingi dengan parit untuk aliran air. Fungsinya adalah untuk pembuangan aliran air dari dalam benteng sekaligus untuk mempersulit lawan mendekati benteng ini. Untuk menghubungkan benteng dengan daratan, sebuah jembatan angkat dipasang di pintu gerbang utama dan diangkat pada saat malam hari. Sebagai kekuatan utama benteng ini, pada dindingnya dibuat lubang-lubang mengarah keluar untuk mengarahkan moncong meriam. Arah pertahanan utama benteng ini adalah menghadap ke laut, dengan asumsi bahwa musuh utama akan datang dari laut dengan armadanya. Ini berarti bahwa para perancang benteng tersebut menduga bahwa lawan utama mereka adalah kekuatan yang memiliki armada laut besar, yakni VOC atau armada Prancis dari India.

Penguatan terhadap benteng terus dilakukan oleh EIC, yaitu dengan penambahan jumlah pasukan. Secara administrasi, Fort Marlborough dikontrol oleh komandan benteng Fort George di Penang dan penambahan pasukan sering dilakukan dari sana. Sebagai akibatnya, lokasi benteng diperluas dengan membangun tempat pemukiman di sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-18 jumlah kekuatan pasukan yang diperbesar menuntut penambahan gudang amunisi. Gudang amunisi yang dibangun mampu menampung empat ratus barel serbuk amunisi. Bagi Inggris, ketika arti strategis Bengkulu semakin meningkat, Dewan EIC di Calcutta

memutuskan pada tahun 1802 untuk meminta izin kepada Parlemen Inggris di London agar Fort Marlborough ditingkatkan statusnya dan langsung dikontrol oleh pusat. Parlemen Inggris menyetujui dan sejak itu Fort Marlborough mewakili kepentingan Inggris secara langsung di seluruh Hindia Timur dan tunduk kepada komandan benteng Fort William di Bengala. Akan tetapi fungsi Fort Marlborough sebagai pusat pertahanan berkurang, walaupun sebagai pangkalan perdagangan meningkat.

Ketika pada tahun 1803 Dewan EIC memutuskan untuk menjadikan Fort Marlborough sebagai pusat penimbunan rempah-rempah Inggris di seluruh Hindia Timur, nilai strategis militernya dialihkan ke pangkalan Inggris di Penang. Hal ini semakin terasa ketika setahun kemudian pangkalan Belanda di Malaka berhasil direbut oleh Inggris. Ini semua terjadi dalam rangka persiapan penyerangan Inggris terhadap koloni Belanda di Jawa sebagai dampak peperangan di Eropa. Selama masa dominasi Inggris di Hindia Timur sampai dengan Kongres Wina tahun 1815, Fort Marlborough tidak memegang peranan lagi. Makna strategisnya tenggelam dibandingkan pangkalan Inggris di Jawa dan Penang. Setelah Jawa dikembalikan kepada Belanda tahun 1816, tidak otomatis Fort Marlborough meningkat kembali nilainya. Ketika pada tahun 1818 Raffles diangkat menjadi Gubernur Bengkulu, Fort Marlborough mulai kembali menunjukkan nilainya. Ambisi Raffles untuk memulihkan kekuasaan Inggris di Hindia Timur dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan raja-raja dan para penguasa pribumi di Sumatra untuk melawan Belanda. Hal ini menyebabkan dijadikannya kembali Fort Marlborough sebagai pangkalan utama. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama.

Pada tahun 1819 Raffles berhasil memperoleh Pulau Tumasik dari Sultan Kedah yang kemudian dibangunnya menjadi bandar laut Singapura. Tujuan utama Raffles adalah untuk menyaingi dan akhirnya mematikan pangkalan laut Belanda di Batavia dengan menutup pelayaran Selat Malaka. Sejak itu, perhatian Raffles tidak tertuju lagi ke Bengkulu, meskipun ia masih menjabat di sana sampai menjelang penyerahannya kepada Belanda berdasarkan kesepakatan Traktat London tahun 1824. Ketika Belanda mulai memerintah Bengkulu, wilayah ini dijadikan sebagai wilayah keresidenan. Sebagai kepala daerah, Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun 1824 mengangkat seorang residen. Residen Belanda ini tidak lagi tinggal di Fort Marlborough tetapi membangun sebuah rumah dinas di depan benteng tersebut. Dengan langkah ini, status Fort Marlborough semakin terbatas fungsinya, tidak lagi sebagai infrastruktur keamanan setempat. Nilai strategis benteng sebagai infrastruktur pertahanan terhadap serangan lawan dari luar semakin berkurang, mengingat setelah Perang Padri tahun 1837 pemerintah Belanda lebih memusatkan perhatian di Sumatra Barat. Di Bengkulu, kekhawatiran Belanda lebih ditujukan pada lawan-lawan pribumi yang dianggap merintangi kebijakan monopoli cengkeh dan kopi, serta ketika dimulainya eksploitasi tambang emas di Manna.

Fort Marlborough yang cukup besar dan luas sebagai benteng tempur tidak lagi dihuni oleh kekuatan pasukan yang besar. Di zaman pemerintahan kolonial Belanda jumlah garnizun yang menempati benteng ini tidak banyak, dan tidak sesuai dengan besarnya benteng ini. Meskipun Inggris pernah merencanakan benteng ini sebagai suatu pangkalan besar, Fort Marlborough tidak pernah terlibat

dalam suatu peperangan baik dalam menghadapi serangan darat maupun laut. Kondisi ini mengakibatkan bentuk fisik benteng itu tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada model yang direnovasi menurut keinginan para pejabat Belanda. Sebaliknya di dalam benteng sendiri terdapat fungsi baru, yaitu ditemukannya beberapa makam dari orang-orang Inggris dan keluarganya yang pernah tinggal atau menjabat di benteng itu. Sampai sekarang bangunan ini tidak memiliki fungsi yang berarti, sangat kontras dibandingkan bekas rumah residen di depannya yang tetap masih berfungsi sebagai pusat pemerintahan Propinsi Bengkulu. (Dinas P dan K, 1998).

Secara kronologis, sejarah benteng Marlborough dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 1714-1719 : Masa Pembangunan Fort Marlborough

Tahun 1719-1724 : Fort Marlborough ditinggalkan sebagai akibat serangan rakyat Bengkulu.

Tahun 1724-1825 : Fort Marlborough kembali dikuasai Inggris

Tahun 1825-1942 : Fort Marlborough dikuasai Belanda

Tahun 1942-1945 : Fort Marlborough dekuasai Jepang

Tahun 1949 : Fort Marlborough kembali dikuasai Belanda

Tahun 1949-1983: Dikuasai oleh Republik Indonesia (TNI-AD, KODIM 0407 Bengkulu Utara)

Tahun 1983-1984: Benteng dipugar Pemerintah Republik Indonesia, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, benteng bersejarah peninggalan bangsa Inggris terakhir dipugar oleh Depdikbud pada tahun 1984 kondisinya kurang terawat.

Akibatnya, kondisi bangunan yang dulu berfungsi sebagai benteng pertahanan militer dan sebagai tempat pengawasan jalur perdagangan tersebut terkesan kumuh. Dinding luar benteng tampak kusam dan ditumbuhi lumut. Sedangkan, dinding dalam benteng yang bercat warna putih, juga mengelupas di banyak tempat dan berjamur. Bahkan di salah satu sudut benteng yang menghadap ke laut, kini telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Kondisi ini membuat benteng yang sangat kuat terlihat jorok. Selain itu, di beberapa dinding benteng yang dibangun tahun 1714 tersebut, terdapat banyak coretan yang merusak keindahannya. Bahkan, sejumlah meriam yang dipasang di atas benteng, juga tidak lepas dari coretan. (Observasi Peneliti, 2010)

c. Usaha Dagang Inggris di Bengkulu tahun 1714-1719

Pseninggalan Inggris terbesar di Indonesia. Benteng Marlborough sesungguhnya bukan sekedar benteng pertahanan militer, karena benteng ini dibangun demi kepentingan perdagangan; penjamin kelancaran suplai lada bagi perusahaan dagang Inggris, *East India Company*, serta pengawasan jalur pelayaran dagang melalui Selat Sunda. Benteng ini berperan ganda yaitu: sebagai markas pertahanan militer sekaligus kantor pusat perdagangan dan pemerintahan Inggris. Marlborough berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia-Belanda pada 1825-1942. (Dinas P dan K, 1982)

Dari berbagai peninggalan yang masih terdapat di dalam bangunan benteng dapat pula diketahui bahwa pada masanya bangunan ini juga berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan termasuk perkantoran, bahkan penjara.

Fungsi benteng Marlborough tidak hanya bersifat sebagai pertahanan militer atau peperangan tetapi juga sebagai pusat pertahanan usaha perdagangan, politik dan ekonomi. Benteng Marlborough juga difungsikan oleh orang-orang Inggris sebagai tempat penimbunan hasil perdagangan rempah-rempah. Kekuasaan politik yaitu untuk mengambil keputusan, membuat dan melaksanakan peraturan, serta menguasai fasilitas keuangan yang memadai untuk mencukupi kebutuhannya. fungsi ini terjadi pada benteng Marlborough yang dibangun dan digunakan oleh bangsa Inggris untuk perlindungan usaha dagang masa lalu yang memiliki kekuasaan di daerah Bengkulu pada tahun 1714-1719. Kolonial Inggris memiliki wewenang dan dukungan kekuatan bukan hanya untuk melakukan transaksi niaga tetapi juga untuk membangun suatu pangkalan dan mengkoordinasikan semua pangkalan yang dibangunnya sehingga berbentuk suatu jaringan dan kolonisasi. Hal tersebut dilaksanakan oleh Inggris, VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dan EIC (*East India Company*) di Asia pada abad 17-18 dengan hak-hak politik dan ekonomi yang bersifat monopolis dari negara induknya.

Benteng Marlborough sebagai tempat perlindungan usaha perdagangan Inggris masa lalu menjadi kebutuhan primer di samping modal dagang mereka. Benteng Marlborough tidak hanya digunakan untuk mengkoordinasikan semua aktivitas dan menjalankan segala urusannya. Benteng Marlborough juga digunakan sebagai simbol kekuatan Inggris yang digunakan sebagai ancaman terhadap lawan-lawannya ketika menghadapi kesulitan untuk mewujudkan maksud-maksud ekonominya.

Benteng Marlborough pada zamannya, dikelola oleh dewan pimpinan terdiri dari deputi gubernur sebagai kepala wilayah pendudukan, komandan benteng sebagai pemimpin militer, dibantu oleh dua pejabat. Pejabat tinggi lainnya adalah semacam kepala perdagangan (*senior merchant*). Pada tahun 1792, tercatat 18 atase perdagangan berkantor di Fort Marlborough. Beberapa kepala perdagangan ini juga menjabat sebagai kepala wilayah atau residen sejumlah kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera, antara lain Manna, Lais, Natal, Tapanuli, dan Krui. Pada tahun 1792 tercatat sembilan orang juru tulis bekerja dan tinggal dalam benteng. Sesuai tujuan pembangunannya, benteng Marlborough memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan usaha perdagangan bagi Inggris di Bengkulu dimasa kejayaannya tahun 1714-1719. (Dinas P dan K, 1982)

2. Benteng Marlborough sebagai tempat Usaha Dagang Inggris dan Untuk Mempertahankan dari Ancaman Luar.

a. Memperkuat kedudukan Inggris dari ancaman Kolonial Belanda

Pendirian benteng Marlborough sebagai usaha untuk mempertahankan diri dan memperkuat kedudukan Inggris dari ancaman kolonial Belanda dimulai pada tanggal 12 Juli 1685, ketika Ralph Ord, wakil dari EIC, menandatangani perjanjian dagang dengan para pemimpin lokal di Bengkulu. Isi perjanjiannya adalah para pemimpin lokal menyediakan lada bagi perusahaan ini sebagai imbalan pihak Inggris akan membantu melindungi daerah Bengkulu dari usaha penjajahan bangsa Belanda. (Dinas P dan K, 1982)

Untuk mengamankan usaha menguasai Bengkulu, Inggris merasa perlu untuk membangun perbentengan. Pada awalnya, Inggris membangun benteng pada

sebidang tanah yang berada di antara laut dan Sungai Serut. Benteng tersebut dinamakan Fort York. Karena lingkungan benteng yang tidak sehat, maka benteng tersebut akhirnya ditinggalkan. Kemudian dibangun benteng baru yang berjarak 2 mil dari Fort York. Benteng baru tersebut dinamakan “Marlborough” untuk menghormati John Churchill, pahlawan perang Inggris di Eropa, yang bergelar Duke Of Marlborough. Pada tahun 1719 benteng Marlborough selesai dibangun dan berfungsi tidak hanya menjadi pusat pemukiman tetapi juga menjadi pangkalan pertahanan militer Inggris, khususnya untuk menghadapi ancaman orang-orang Belanda.

Benteng ini dibuat dari batu karang yang dikelilingi dengan parit untuk aliran air. Fungsinya adalah untuk pembuangan aliran air dari dalam benteng sekaligus untuk mempersulit lawan mendekati benteng ini. Untuk menghubungkan benteng dengan daratan, sebuah jembatan angkat dipasang di pintu gerbang utama dan diangkat pada saat malam hari. Sebagai kekuatan utama benteng ini, pada dindingnya dibuat lubang-lubang mengarah keluar untuk mengarahkan moncong meriam. Arah pertahanan utama benteng ini adalah menghadap ke laut, dengan asumsi bahwa musuh utama akan datang dari laut dengan armadanya. Ini berarti bahwa para perancang benteng tersebut menduga bahwa lawan utama mereka adalah kekuatan yang memiliki armada laut besar, yakni VOC atau armada Prancis dari India.

Penguatan terhadap benteng terus dilakukan oleh EIC, yaitu dengan penambahan jumlah pasukan. Secara administrasi, Fort Marlborough dikontrol oleh komandan benteng Fort George, lokasi benteng diperluas dengan membangun tempat

pemukiman di sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-18 jumlah kekuatan pasukan yang diperbesar menuntut penambahan gudang amunisi. Gudang amunisi yang dibangun mampu menampung empat ratus serbuk amunisi. Bagi Inggris, perlawanan rakyat Bengkulu semakin meningkat, Dewan EIC di Calcutta memutuskan pada tahun 1802 untuk meminta izin kepada Parlemen Inggris di London agar Fort Marlborough ditingkatkan statusnya dan langsung dikontrol oleh pusat. Parlemen Inggris menyetujui dan sejak itu Fort Marlborough mewakili kepentingan Inggris secara langsung di seluruh Hindia Timur dan tunduk kepada komandan benteng Fort William di Bengala. Akan tetapi fungsi Fort Marlborough sebagai pusat pertahanan berkurang, walaupun sebagai pangkalan perdagangan meningkat.

Ketika pada tahun 1803 Dewan EIC memutuskan untuk menjadikan Fort Marlborough sebagai pusat penimbunan rempah-rempah Inggris di seluruh Hindia Timur, nilai strategis militernya dialihkan ke pangkalan Inggris di Penang. Hal ini semakin terasa ketika setahun kemudian pangkalan Belanda di Malaka berhasil direbut oleh Inggris. Ini semua terjadi dalam rangka persiapan penyerangan Inggris terhadap koloni Belanda di Jawa sebagai dampak peperangan di Eropa. Pemerintah Inggris mendirikan benteng ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan mereka dari ancaman kolonial Belanda. (Dinas P dan K, 1982)

b. Memperkuat kedudukan Inggris dari ancaman Kesultanan Banten

Inggris datang ke Bengkulu dan mendirikan kantor dagangnya di Bengkulu tahun 1685 dengan melakukan kegiatan perdagangan dan menandatangani perjanjian perdagangan dengan wilayah-wilayah pesisir yang berdekatan. Inggris telah

memperoleh supremasi mulai dari Meyjuto di Utara sampai ke Krui di Selatan. Wilayah-wilayah Selatan lebih berperan sebagai bandar ekspor merica yang utama bagi seluruh wilayah pesisir mulai dari Indrapura hingga Krui lebih banyak mempunyai hubungan dengan dunia luas. Seluruh penguasa kerajaan Banten Sultan Hasanuddin tahun 1552-1570. (Dinas P dan K, 1982)

Pada 24 Juni 1685 tiga orang utusan Inggris yaitu Ralph Ord, Benyamin Bloome, dan Joshua Charlton tiba di Bengkulu. Mereka mencoba menjajaki suatu hubungan perdagangan dengan masyarakat Bengkulu. Negosiasi pun dilakukan. Kedua belah pihak sepakat untuk saling mengadakan kerjasama perdagangan. Pada 16 Agustus 1685, kedua belah pihak menandatangani suatu perjanjian yang mengatur hubungan perdagangan. Pihak Inggris diwakili oleh Charles Baswell Esq, sedangkan pihak Bengkulu diwakili oleh Pangeran Ingalu Raja, dari Silebar. Melalui kesepakatan itu, Inggris pun dapat masuk ke Bengkulu untuk berdagang. Pada pertengahan 1685, Inggris membangun Benteng York di dekat Bengkulu. Di daerah Selebar, jaraknya kira-kira enam kilometer sebelah selatan Bengkulu, Inggris juga membangun sebuah kantor dagang lengkap dengan penjagaan tentara. Dengan pendirian benteng dan kantor dagang Inggris di Bengkulu, para pedagang semakin ramai mengunjungi Bengkulu. Penduduk Eropa yang tinggal semakin bertambah.

Penyelenggaraan transaksi perdagangan merica diselenggarakan antara Inggris dengan Sultan Banten, pihak kompeni Inggris menghendaki agar para kepala adat (Pangeran dan Kalipa-Kalipa) untuk melebarkan batas kekuasaan tradisional mereka dalam kepentingan bertanam merica. Namun kompeni Inggris pula yang telah merampas hak mereka untuk mengutip hasil yang merupakan simbol yang

paling berarti dari status mereka. Hal itulah yang menimbulkan keengganan yang diperhatikan oleh Pangeran dari Sungai Lemau untuk menyerahkan privilese itu kepada pihak kompeni Inggris. Hal inilah yang mengakibatkan hubungan Inggris dengan Kesultanan Banten menjadi tidak baik.

Perbedaan-perbedaan mengenai pemikiran hukum Inggris dan praktek-praktek adat negara Bengkulu menjadi sumber kemelut dan sengketa yang telah mendorong terjadinya konflik yang menimbulkan masalah kerjasama dalam usaha perdagangan dan pendudukan daerah kekuasaan bangsa Inggris dengan Kesultanan Banten. Oleh sebab itu, bangsa Inggris mendirikan benteng yang bernama Marlborough dimaksudkan sebagai pusat kedudukan tentara Inggris di Bengkulu dan untuk mengatasi ancaman-ancaman pemberontakan serta penyerangan dari Kesultanan Banten. Selain itu juga digunakan sebagai tempat perlindungan usaha perdagangan Inggris di daerah Bengkulu. (Dinas P dan K, 1982)

c. Mengatasi kemungkinan ancaman pemberontakan rakyat yang merasa tertekan oleh politik penjajahan yang dijalankan Inggris

Pada tahun 1714 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collet mulailan di bangun sebuah benteng pertahanan Inggris di Bengkulu yaitu benteng Marlborough, benteng ini dibuat secara permanen sehingga benteng itu masih tetap berdiri kokoh sampai dengan sekarang. (Dinas P dan K, 1982)

Pada tahun 1719 benteng Marlborough selesai dibuat oleh Inggris, namun baru saja benteng itu selesai dibangun langsung diserbu oleh rakyat Bengkulu. Benteng tersebut dibakar dan dirusak oleh penduduk. Orang-orang Inggris yang berada di

Benteng tersebut berusaha untuk menyelamatkan diri dan terpaksa meninggalkan Bengkulu dengan menggunakan kapal-kapal mereka melalui laut menuju Batavia kemudian ke Madras, India.

Sejak penyerangan yang dilakukan oleh rakyat, Bengkulu mengalami kekosongan misionaris. Pada 1721, Inggris mengirimkan kembali pasukan ke Bengkulu dan berhasil merebut Benteng Marlborough. Inggris datang kembali dengan mengadakan perjanjian baru dengan pihak Bengkulu, perjanjian itu dibuat lebih singkat dengan nada yang lebih lunak dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya. Perjanjian Inggris dilakukan dengan penguasa-penguasa Bengkulu pada tanggal 17 April 1724. Kemudian setelah diadakannya perjanjian tersebut Inggris kembali menduduki benteng Marlborough yang sempat ditinggalkan karena serangan dari rakyat Bengkulu. Dalam surat perjanjian tanggal 17 April 1724 tersebut diketahui bahwa pihak Bengkulu menyatakan kesediaan untuk melakukan penanaman pohon lada sebanyak 1.000 batang oleh setiap Kepala Keluarga dengan harga 15 dolar Portugis untuk satu bahar lada yang diserahkan kepada pihak Inggris.

Pada tahun 1724 tidak terdapat kekacauan dan pemberontakan yang berarti dari penduduk, namun pihak Inggris untuk kepentingan keamanan dirinya menganggap perlu untuk menurunkan pimpinan (Angkatan Laut Inggris) Captain James Macrae untuk mendampingi Gubernur pengganti Joseph Walsh di Bengkulu.

Pada tahun 1807 terjadi kekacauan lagi di Bengkulu ketika itu yang berkuasa sebagai Gubernur Inggris adalah Residen Thomas Parr, yang mati dibunuh oleh

rakyat Bengkulu. Thomas Parr adalah seorang Gubernur yang sering melakukan tindakan-tindakan kasar yang dianggap menghina penduduk, kebiasaan Thomas Parr adalah meludahi dan memecut dengan cemeti kuli-kuli yang mengangkat/menandunya. Thomas Parr adalah orang yang memperkenalkan tanaman kopi kepada rakyat Bengkulu dengan jalan tanam paksa yang dianggap merugikan penduduk.

Inggris mengadakan perjanjian dengan penguasa penduduk setempat, perjanjian yang ternyata selalu berat sebelah. Di satu pihak selalu menguntungkan bangsa Inggris dengan menempatkan Inggris pada kedudukan monopoli yang kuat sebagai pembeli lada tunggal dengan harga yang ditentukan rendah. Pada pihak lain rakyat merasa dibebani secara paksa untuk menanam sekian ribu pohon merica, sebagai tanaman wajib dan tanaman paksa sejak abad ke-19 sudah diperluas dengan tanaman kopi, pala dan cengkeh.

Tindakan-tindakan paksa yang merugikan rakyat Bengkulu itu secara terus menerus telah menimbulkan rasa benci penduduk terhadap Inggris di Bengkulu, berulang kali terjadi perlawanan rakyat di seluruh daerah Bengkulu sekalipun mutlak untuk kesekian kalinya rakyat ditindas oleh Inggris. Dan akibatnya rakyat selalu dalam keadaan menderita, kemenangan yang mutlak dicapai oleh rakyat Bengkulu ketika mereka dapat mengusir bangsa Inggris selama 5 tahun.

Dari uraian di atas, tujuan utama kedatangan Inggris ke Bengkulu yaitu untuk menguasai perdagangan merica (lada) dengan menduduki daerah-daerah di bagian utara dan selatan kota Bengkulu sepanjang kurang lebih 600 km. Dan mendirikan kekuasaan di tempat-tempat penguasaan Inggris, salah satunya dengan mendirikan

benteng Marlborough di Bengkulu sebagai pusat pertahanan musuh-musuh Inggris dan sebagai benteng pertahanan dari pemberontakan para penduduk Bengkulu yang merasa tertekan dengan politik pemerintahannya serta sebagai pusat perlindungan usaha perdagangan Inggris di Bengkulu. (Dinas P dan K, 1982)

C. Pembahasan

1. Kedudukan Inggris dari Ancaman Kolonial Belanda di Bengkulu

Perkembangan Politik dan Pemerintahan di Bengkulu. Bengkulu melalui Traktat London tanggal 17 Maret 1824 beralih tangan dari pemerintah Inggris kepada pemerintah Belanda.

Pergantian kekuasaan mulai berlaku sejak 6 April 1825 dan diikuti dengan diangkatnya Residen Bengkulu B.C. Verploegh. Residen bertugas menangani urusan di ibukota Bengkulu dengan dibantu beberapa orang pejabat, seperti notaris, juru lelang, sedangkan untuk menangani urusan di luar ibukota Bengkulu diangkat seorang kepala wilayah.

Daerah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu dimulai dari arah paling utara, yaitu Muko-Muko. Pada masa peralihan dari pemerintahan kompeni Inggris ke pemerintah kolonial Belanda, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah kolonial besar, yaitu hampir satu juta gulden/tahun yang digunakan untuk merawat jalan serta bangunan, membayar tunjangan bagi Kepala Anak Negeri, dan membeli lada penduduk.

Pengeluaran ini dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang dapat diambil dari Bengkulu. Oleh karenanya menurut E.A. Francis, Asisten Residen di Bengkulu (1828-1830), Bengkulu adalah wilayah yang tidak menguntungkan sehingga perlu dilakukan penataan kembali peraturan dan wilayah Bengkulu. Pembaharuan yang pertama dilakukan adalah tidak lagi membeli lada penduduk. Kedua, Bengkulu dimasukkan ke wilayah administratif Keresidenan Pantai Barat Sumatra, sehingga jabatan dalam pemerintahan yang tertinggi adalah Asisten Residen dengan gaji f. 800. Ketiga, pos-pos pemerintahan yang berada di luar ibukota Bengkulu dihapuskan.

Masa peralihan ini juga diwarnai dengan situasi politik yang tidak menguntungkan. Penghapusan pos-pos pemerintah di luar kota Bengkulu ini berpengaruh buruk terhadap ekonomi dan keamanan wilayah. Apabila pada tahun 1825 dan 1826 jalan-jalan ke distrik Kaur, Manna, dan Seluma ramai dipenuhi pedati yang mengangkut beras, tetapi setelah pos-pos pemerintah di luar Bengkulu dihapuskan, aktivitas perdagangan menurun. Hal ini antara lain disebabkan situasi di jalan yang tidak aman, sering terjadi perampokan dan pembunuhan terutama di jalur perdagangan Krui, Kaur, Manna, dan Seluma di sebelah selatan kota Bengkulu. Keadaan seperti ini sengaja dibiarkan oleh para kepala pribumi karena kerusuhan dapat menguntungkan mereka. Misalnya, mereka bisa mendapatkan uang denda yang dibayarkan dari kasus pencurian atau pembunuhan yang terjadi di wilayahnya.

Sikap para kepala pribumi ini, terutama yang telah lama menikmati gaji dari Kompeni Inggris, disebabkan mereka menolak kebijakan Kompeni Inggris yang

menyerahkan Bengkulu kepada pemerintah kolonial Belanda. Mereka mengakui kekuasaan Kompeni Inggris, tetapi Bengkulu bukan daerah taklukannya sehingga mereka ingin tetap dihargai hak-haknya serta adat istiadatnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tahun 1818 antara Kepala Pribumi dengan Raffles.

Selain kelompok elit pribumi, pemerintah kolonial Belanda juga harus menghadapi penentangan kelompok Pengusaha perkebunan dan perdagangan rempah-rempah yang sebagian besar adalah orang Inggris yang berada di Bengkulu maupun di wilayah lain di Pulau Sumatera. Meskipun demikian, perubahan-perubahan dalam bidang pemerintahan terus dilakukan. Pada masa pemerintahan Asisten Residen Knoerle (1830-1833) di wilayah Kaur, Krui, Muko-Muko, dan Silebar ditempatkan kembali seorang posthouder. Selain itu, Knoerle juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang memicu kemarahan elit pribumi, misalnya peraturan tentang penghapusan gelar kepangeranan dengan hak-hak tradisionalnya dan diadakannya reformasi dalam sistem pengadilan. Dilanjutkan pada tahun 1832 Knoerle mengeluarkan kebijakan wajib tanam lada kepada kepala adat di distrik-distrik mulai dari Seluma sampai ke Kaur. Setiap kepala keluarga diwajibkan menanam 700 batang pohon lada (*Piper nigrum L.*), sedangkan untuk seorang bujang berusia di atas 15 tahun diwajibkan menanam 300 batang.

Wajib tanam ini tidak diberlakukan secara serentak, dimulai dari Kampung Sedada (Krui) yang melibatkan 25 orang kepala keluarga. Selanjutnya, wajib tanam lada diberlakukan juga di daerah-daerah lain, misalnya di Seluma meliputi

dusun-dusun Seluma, Allas, Angalam, dan Tallo, di distrik Lais, dan wilayah Muko-Muko (tahun 1833). Akan tetapi, percobaan penanaman lada ini tidak berjalan dengan baik karena tidak mendapat dukungan dari penduduk. Penduduk tidak menyukai peraturan 'wajib tanam lada' dan para Anak Raja kecewa karena kekuasaan tradisionalnya dikurangi. Mereka bersama-sama mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan Knoerle. Pada 27 Juli 1833 terjadi kerusuhan yang berakhir dengan terbunuhnya Asisten Residen J Knoerle di dusun Tanjung Ibrahim. Setelah peristiwa ini, untuk sementara pemerintahan Bengkulu dipegang oleh E.A. Francis. Pada masa pemerintahan Francis, sejak tahun 1833 Sistem Tanam Paksa resmi diberlakukan di Bengkulu. Berdasarkan ketetapan Minister van Kolonien van den Bosch nomor. 369 , tanggal 14 Oktober 1833 seluruh penduduk Bengkulu diwajibkan menanam 300 pohon kopi (*Coffea canephora* L.) dan 250 batang pohon lada (*Piper nigrum* L.) setiap kepala keluarga, tetapi bagi mereka yang dapat membayar pajak antara f. 2- f. 4 dibebaskan dari wajibtanam.

Oleh sebab itu, penduduk Bengkulu harus memperbaharui kebun-kebun lada dan mulai menanam tanaman kopi. Wajib tanam lada dan kopi tersebut tidak dapat berjalan lancar karena penduduk tidak puas dengan perjanjian kerja yang berlaku. Misalnya, pada tahun 1847 penduduk daerah Krui menuntut adanya perbaikan perjanjian kerja karena 'wajib tanam lada dan kopi' selama ini dirasakan memberatkan penduduk. Kasus lain, penduduk di Seluma dan sekitar kota Bengkulu berhenti menanam lada dan kopi. Dampaknya, hasil lada masih jauh dari harapan. Dari tahun 1846 sampai tahun 1848, kebun-kebun lada milik pemerintah di Bengkulu hanya menghasilkan 3.840 pikul/tahun, sedangkan kebun-kebun kopi penduduk belum banyak menghasilkan.

Permasalahan lain yang harus dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu adalah serangan-serangan yang dilakukan oleh penduduk dataran tinggi terhadap penduduk yang bermukim di dataran rendah. Meskipun pada tahun 1841 pemerintah kolonial telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan empat pasirah dari Lebong, tetapi sampai tahun 1855 masih terjadi pelanggaran perbatasan daerah dan penyerangan-penyerangan yang membahayakan penduduk daerah rendah. Oleh karena itu, pada tahun 1856 pemerintah kolonial meninjau kembali perjanjian tahun 1841 dan mengadakan kesepakatan baru dengan pasirah-pasirah di Lebong.

Selain itu, pada tahun 1858 pejabat pemerintah di Bengkulu dan pejabat pemerintah di Palembang mengadakan kesepakatan untuk melakukan ekspedisi militer ke daerah-daerah Lebong, Rejang, Empat Lawang, dan Pasemah. Kesepakatan itu diikuti dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah tanggal 29 Juni 1859 yang berisi perintah kepada Mayor Cobet untuk melakukan ekspedisi militer ke daerah Rejang, Lebong, dan Pasemah. Hasil ekspedisi militer ini, daerah Rejang dan Lebong dapat ditaklukan dan dimasukkan ke wilayah administratif Karesidenan Palembang.

Selanjutnya, pada tahun 1866 daerah Pasemah Ulu Manna ditaklukan dan dimasukkan ke wilayah administratif Bengkulu. Reorganisasi bidang pemerintahan di Bengkulu kembali terjadi pada masa pemerintahan Asisten Residen J. Walland (1861-1865), antara lain dengan penghapusan pemerintahan kabupaten (regentschappen) dan tetap mempertahankan sistem marga. Secara berangsur regentschap dihapuskan di Sungai Lemau tahun 1861, Sungai Itam (tahun 1862).

Silebar (tahun 1864) dan yang terakhir Muko-Muko pada tahun 1870. Selanjutnya, desa-desa disatukan dalam satu ikatan marga dan gabungan beberapa marga disatukan menjadi satu wilayah, yaitu onderafdeeling di bawah pimpinan seorang kontrolir.

Kebijakan penarikan pajak ini memicu kembali perlawananan rakyat Bengkulu terhadap pemerintah kolonial Belanda. Misalnya, pada bulan April 1873 tempat tinggal Asisten Residen Humme diserang oleh tiga orang penduduk dari Sungai Itam. Meskipun serangan dapat digagalkan, tetapi di kota Bengkulu orang-orang Eropa menjadi panik dan mereka diungsikan ke dalam benteng untuk beberapa hari. Perlawanan penduduk lainnya juga terjadi di daerah Seluma dan Lais dan puncak perlawanan penduduk terjadi pada tanggal 2 September 1873 ketika Asisten Residen H.C. v . Amstel dan Kontrolir daerah Lais Castens terbunuh dalam perjalanannya ke Bintunan (onderafdeeling Lais).

Menurut laporan pejabat Belanda, kerusuhan-kerusuhan terjadi karena penduduk dihasut oleh keturunan Anak Raja. Penghapusan sistem pemerintahan tradisional telah berdampak pada turunya prestise keturunan Anak Raja sehingga mereka menghasut penduduk untuk melawan pemerintah seperti yang terjadi pada kerusuhan di Bintunan yang mengakibatkan terbunuhnya H. van Amstel dan E.F.W. Carstens. Hal ini berkaitan dengan penolakan pemerintah terhadap permintaan pemulihan kelembagaan adat turun temurun oleh keturunan Anak Raja.

Berkaitan dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Bengkulu maka pemerintah di Batavia mengirim dua kompi militer untuk menumpas kerusuhan-kerusuhan itu. Selanjutnya, di Bengkulu terjadi pengejaran dan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap pemimpin pemberontakan, antara lain Pasirah Samban, Pasirah Tampan Anak Dalam, dan Haji Maridan. Setelah operasi-operasi militer dilakukan, maka perlawanan penduduk Bengkulu dapat dihentikan. Setelah pemerintahan kolonial Belanda dapat menguasai wilayah Bengkulu dan perlawanan penduduk ditumpas. Pada tahun 1878 pemerintah meningkatkan status Bengkulu menjadi keresidenen.

Selanjutnya, sejak tahun 1904 wilayah keresidenan Bengkulu bertambah luas dengan dimasukkannya daerah Dataran Tinggi Rejang-Lebong yang subur. Hal ini dilakukan untuk kepentingan politik dan ekonomi kolonial Belanda meskipun penggabungan tersebut tidak disetujui oleh para pasirah wilayah Sindang. Dari sudut ekonomi, dimasukkannya Dataran Tinggi Rejang Lebong ke wilayah Bengkulu berarti menyatukan daerah penambangan, semula sebagian daerah penambangan Lebong berada di wilayah Bengkulu dan sebagian lain di wilayah Palembang. Selanjutnya, pada tahun 1908 melalui Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1908 no. 646, Keresidenan Bengkulu dibagi menjadi lima daerah afdeeling, yaitu Afdeeling Bengkulu, Afdeeling Lebong, Afdeeling Seluma, Afdeeling Manna, dan Afdeeling Krui. Pembuatan 'peta baru' daerah yang berhasil dikuasai menandakan bahwa Bengkulu secara keseluruhan mulai tergabung dengan pola umum yang diterapkan di seluruh wilayah Hindia Belanda.

2. Kedudukan Inggris dari Kesultanan Banten di Bengkulu

Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fath Abdul Fatah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu Pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut kesultanan Mataram dan serta wilayah yang sekarang menjadi provinsi Lampung. Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi Lampung dikuasai oleh kesultanan Banten.

Pada zaman pemerintahan Sultan Haji, tepatnya pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Issac de Saint Martin, Admiral kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung.

Kesultanan Banten dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhamad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles. Tragedi ini menjadi klimaks dari penghancuran Surasowan oleh Gubernur-Jenderal Belanda, Herman William Daendels tahun 1808.

Sampai pada akhir abad ke-15 kerajaan-kerajaan kecil di daerah Bengkulu berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit yang mengalahkan Sriwijaya pada abad ke 13. Dalam periode ini kerajaan-kerajaan kecil di daerah Bengkulu, khususnya

di daerah Rejang Lebong, dipimpin oleh para Bikaw atau Biksu (pimpinan agama Budha) yang datang dari kerajaan Sriwijaya. Dan dalam periode ini pula di Bengkulu berkembang tulisan asli daerah dengan abjad Ka Ga Nga. Setelah kekuasaan kerajaan Majapahit mundur pada pertengahan abad ke-16 kerajaan-kerajaan kecil di daerah Bengkulu masuk ke dalam pengaruh Kesultanan Banten, terutama di daerah pantai mulai dari kerajaan Selebar di Sungai Jenggalu sampai batas sungai Urai di Bengkulu Utara. Sejak pengaruh dari Kesultanan Banten itulah agama Islam masuk Ke Bengkulu. Sementara itu sejak permulaan abad ke-17 berkembang pula pengaruh dari Kerajaan Aceh dari Utara melalui hubungan dagang terutama dalam perdagangan lada dan juga membawa pengaruh dalam perkembangan agama Islam. Khusus terhadap kerajaan Sungai Lemau kira-kira pada permulaan abad ke-17 berkembang pula pengaruh dari Kerajaan Melayu "Pagar Ruyung".

Pada kurun waktu antara 1685-1824, Dalam masa pemerintahan Inggris selama + 140 tahun tidak banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Bengkulu karena pemerintah Inggris pada masa itu hanya memusatkan perhatian pada penguasaan perdagangan lada dan kopi saja, tidak mencampuri urusan pemerintahan atau kemasyarakatan. Peninggalan-peninggalan dari pemerintah Inggris yang masih terdapat di Bengkulu saat ini antara lain Benteng Marlborough dan beberapa monumen lainnya di kota Bengkulu, bekas Benteng "Fort York" dibagian Utara kota Bengkulu, Fort Anna di Muko-Muko dan Fort Linau di Bintuhan.

Dalam kurun waktu dari 1824 sampai dengan 1942 Propinsi Bengkulu berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Berbeda dengan periode pemerintahan Inggris sebelumnya, dalam periode Pemerintahan Hindia Belanda selama + 118 tahun kehidupan masyarakat di daerah Bengkulu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan penjajah, baik dalam penguasaan bidang pemerintahan bahkan sampai mencampuri kehidupan kemasyarakatan dan adat istiadat. Pada masa ini, pemerintah telah mencoba melakukan pembakuan hukum adat bagi suku-suku yang hidup di daerah Bengkulu. Upaya pembakuan hukum adat, yang disebut Undang-Undang Simbur Cahaya, dilakukan pada tanggal 21 Februari 1862 oleh J. Walland, Asisten Residen yang mengepalai wilayah Bengkulu pada masa itu. Pada tahun 1862 itu juga, Sultan Muko-Muko menetapkan kitab undang-undang bagi masyarakat di kesultanan Muko-Muko yang disebut Oendang-Oendang Moeko-Moeko.

Pembakuan hukum adat untuk masyarakat di daerah Bengkulu seperti tersebut di atas ternyata menimbulkan keresahan di kalangan anak negeri. Banyak kalangan masyarakat berpendapat bahwa banyak hal dalam undang-undang Simbur Cahaya yang bertentangan dengan dengan adat-istiadat yang selama ini berlaku dalam kehidupan masing-masing suku di Bengkulu. Hal ini menyebabkan adat-istiadat yang selama ini berlaku semakin terdesak oleh undang-undang yang baru, dan membuka peluang pula tindakan sewenang-wenang dari para penguasa. Dengan timbulnya keresahan ini maka mulai tahun 1909 (pada masa pemerintahan Residen O.L. Helfrich) dilakukan penyusunan ulang undang-undang adat daerah Bengkulu. Penyusunan undang-undang baru dilakukan oleh suatu permusyawaratan besar oleh masing-masing afdeeling dan onderafdeeling. Dalam

tahun 1910, Undang-Undang Adat Lembaga untuk setiap afdeeling (onderafdeeling) telah rampung disusun, dan pada tahun 1911 undang-undang tersebut disahkan oleh residen.

3. Kedudukan Inggris dari Ancaman Pemberontakan Rakyat Bengkulu yang Merasa Tertekan oleh Politik yang Dijalankan oleh Inggris.

Dalam perspektif sejarah yang disebut “perlawanan rakyat” ini termasuk salah satu bentuk dari sebuah gerakan sosial. Dalam kajian sejarahnya, yang disebut sebagai gerakan sosial sebenarnya merupakan gejala umum yang terjadi pada masyarakat petani sebagai gerakan protes terhadap dominasi kekuasaan yang ada. Sejarah gerakan sosial di Indonesia telah mencatat, bahwa selama abad ke 19 hingga awal abad ke 20 secara terus menerus telah terjadi pergolakan petani seperti pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, kegaduhan, dan sejenisnya, yang sempat menggoncangkan tatanan masyarakat dan pemerintahan kolonial, terutama kolonial Belanda.

Secara umum gerakan-gerakan sosial sebagai suatu protes merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Di wilayah Bengkulu, setidaknya telah terjadi secara menyolok dua kali peristiwa perlawanan rakyat selama masa pemerintahan kolonial Inggris (1685-1825). Perlawanan rakyat terhadap pemerintah koloni Inggris (EIC) yang pertama terjadi pada tanggal 23 Maret 1719, dan yang kedua kalinya terjadi pada bulan Desember 1807 yang dikenal dengan peristiwa Mount Felix (27 Desember 1807).

Sementara pada masa penjajahan Belanda di sepanjang abad ke 19, setidaknya ada tiga peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah perlawanan rakyat Bengkulu, yaitu peristiwa 1833, peristiwa 1835, dan peristiwa 1873.

Jauh sebelum peristiwa penyerbuan rakyat Bengkulu ke Fort Marlborough pada tanggal 23 Maret 1719, ketegangan sosial telah terjadi antara para penguasa pribumi Bengkulu, khususnya rakyat Selebar. Ketegangan hubungan antara pihak Inggris dengan Pangeran Ingallo (Jenggalu) alias Pangeran Nata Diradja penguasa dari Selebar, berawal dari hubungan kontrak perjanjian dagang. Pihak Inggris tidak senang bahkan merasa dirugikan karena Pangeran Selebar masih menjalin hubungan dagang dengan pihak Belanda. Disinyalir, rakyat Selebar serta anak keturunannya Pangeran Nata Diradja menaruh dendam atas kematian Pangeran Selebar yang diduga dibunuh oleh Inggris di Fort York pada tanggal 4 Nopember 1710.

Puncaknya ketegangannya, pada malam hari tanggal 23 Maret 1719, Fort Marlborough diserbu sekitar 80 orang yang sebagian besar diperkirakan dari suku Lembak dan Selebar – yang mengakibatkan orang-orang Inggris melarikan diri ke Batavia dan Madras. Tokoh yang diduga kuat sebagai pemimpin penyerbuan Fort Marlborough itu antara lain : Pangeran Mangkuradja dari Sungai Lemau, Pangeran Intan Ali dari Selebar, Pangeran Sungai Itam, dan juga Syed Ibrahim (Siddy Ibrahim) yang disebutkan sebagai seorang ulama besar yang punya pengaruh pada masyarakat di pegunungan.

Peristiwa Mount Felix (1807).

Mount Felix adalah sebuah nama yang diberikan oleh orang Inggris untuk menyebut sebuah kawasan perbukitan yang terletak di sebelah utara, sekitar 25 Km dari pusat kota Bengkulu. Sementara masyarakat pribumi menyebutnya sebagai Bukit Palik.

Ketegangan sosial yang terjadi selama masa pemerintahan Walter Ewer (1800-1805) tampaknya terus berkelanjutan hingga masa penggantinya, yaitu Thomas Parr. Residen Inggris ini hanya memerintah di Bengkulu selama dua tahun, yaitu dari tahun 1805-1807, yang berakhir dengan membawa kematiannya secara tragis. intervensi Thomas Parr terhadap kehidupan tradisional para kepala adat, terutama dalam hal peradilan pribumi, sering dilakukan tanpa meminta persetujuan dari para kepala adat. Dengan demikian, tampak semakin kompleks ketegangan-ketegangan sosial selama masa pemerintahan Thomas Parr.

Puncak dari segala ketegangan sosial itu pada akhirnya meletus pada tanggal 27 Desember 1807. Thomas Parr dibunuh pada tanggal 27 Desember 1807 di kedimanannya di Mount Felix, yang berlokasi sekitar 3 Mil sepanjang garis pantai dari Fort Marlborough.

Menurut sebuah sumber, Thomas Parr dimakamkan di daerah tertutup di Fort Marlborough, dengan pertimbangan, untuk menghindari perasaan penduduk lokal, dan juga dikawatirkan akan digali dan dinajiskan (dikutuk) oleh penduduk lokal. Demikian juga dengan makam Charles Murray, sekretarisnya yang telah berusaha menyelamatkan Mr. Parr, dan meninggal pada tanggal 7 Januari 1808.

Bagi pemerintah kolonial Inggris, bagaimana pun juga Thomas Parr tetap dianggap sebagai pahlawan karena jasa dan pengabdianya. Oleh karena itu, pemerintah Inggris kemudian mendirikan sebuah monumen untuk mengenangnya. Monumen tersebut dibangun diatas tanah yang berlokasi tidak jauh dari pusat ibukota Bengkulu (sekitar 150 kaki) dari Fort Marlborough. Monumen yang didirikan tanggal 7 Januari 1808 itu, terdapat prasasti (memori) yang berkaitan dengan peristiwa Mount Felix. Orang-orang Inggris menyebut dengan nama Parr Monument, sedangkan kelompok elite pribumi Bengkulu menyebutnya sebagai Taman Raffles (Raffles Park). Penduduk pribumi Bengkulu itu sendiri lebih akrab menyebutnya sebagai kuburan bulek.

Selama pemerintahan Asisten Residen J.H. Knoerle (1831-1833), posisi elite pribumi Bengkulu semakin terjepit. Dengan diaktifkannya para pegawai Eropa yang menduduki posisi sebagai posthouder, maka kekuasaan para kepala pribumi di wilayah luar ibukota semakin terbatas karena mendapat kontrol yang ketat. Tekanan dan intervensi terhadap kehidupan tradisional elite pribumi semakin dirasakan terutama yang berkaitan dengan lembaga adat yang sudah mapan.

Penghapusan gelar kepangeranan, penghapusan hak-hak tradisional para kepala pribumi yang sudah mengakar, serta mereformasi sistem pengadilan tradisional yang sudah mapan, jelas merugikan posisi elite pribumi Bengkulu. Menurutnya, pemakaian gelar pangeran bagi para kepala pribumi Bengkulu tidak perlu diteruskan karena tidak ada fungsinya, serta tidak bermanfaat bagi masyarakat, dan pemerintah Belanda, kecuali gelar regent (bupati), bagi mereka yang telah diangkatnya.

Sementara itu, Bupati Muko-Muko, Sultan Khalifatullah Hidayat Syah (Tuanku Seri Maharaja Chalipatullah Indiyat Shah) juga tak luput dari pemangkasan tunjangan bulanannya. Tunjangan bulanannya yang semula diterima sebesar f. 600 perbulan, kini dipangkas menjadi f. 150 per bulan. Bahkan di wilayah Muko-Muko telah di tempatkan seorang Kontrolir yang dibantu oleh 22 orang Opas (polisi Belanda), yang secara tidak langsung juga untuk mengontrol dan mengurangi ruang gerak kekuasaan Sultan Muko-Muko.

Nasib Sultan Muko-Mukoini bahkan lebih tragis dibanding dengan nasib para bupati lainnya (Pangeran Sungai Lemau dan Pangeran Sungai Itam). Laporan de Perez yang disampaikan kepada Dewan Hindia, Komisaris Pemerintah untuk Sumatra di Batavia, menyebutkan bahwa Knoerle telah menurunkan Bupati Muko-Muko, karena dianggap menindas rakyatnya. Bupati Muko-Muko tersebut kemudian di bawanya ke ibukota Bengkulu, dan akhirnya meninggal di Bengkulu pada awal tahun 1834.

Posisi para bupati, serta para kepala pribumi lainnya, termasuk anak keturunannya benar-benar mendapat tekanan yang berat selama masa pemerintahan Belanda di bawah kepemimpinan Asisten Residen J.H. Knoerle.

Reformasi di bidang hukum (pengadilan) yang dilaksanakan oleh J.H. Knoerle tidak hanya berdampak bagi surutnya pendapatan bagi para kepala pribumi dan anak keturunannya, tetapi juga membawa akibat jatuhnya prestise mereka di dalam masyarakat tradisionalnya. Sebaliknya, J.H. Knoerle menganggap bahwa golongan anak raja (anak keturunan elite pribumi) sangat berbahaya bagi masyarakat, dan merugikan pemerintah Belanda.

Dalam sistem pengadilan sebelumnya, golongan anak raja ini selalu lepas dari jeratan tindak pidana kriminal, meskipun telah melakukan pelanggaran tindak kriminal. Oleh sebab itulah, Knoerle lalu menerapkan sistem pengadilan yang keras terhadap mereka. Beberapa dari mereka ada yang terkena vonis hukuman mati, dan dipecat dari pekerjaannya, serta ada pula yang dibuang ke Pulau Jawa.

Tindakan Knoerle yang terlalu keras terhadap para kepala pribumi dan tradisinya ini jelas bertentangan dengan kebijaksanaan politik pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Dalam hal ini, Komisaris Jendral Van Der Capellen pernah menginstruksikan agar para pegawai Eropa memperkokoh posisi para bupati serta mendukung sistem pewarisan jabatannya. Instruksi itu kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Batavia tertanggal 21 Desember 1827, nomor: 15. Intinya menganjurkan agar para pegawai Eropa menyambut para bupati dan para kepala pribumi lainnya dengan ramah-tamah, serta memperlakukan dengan penuh hormat sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan serta memupuk rasa persahabatan baik dengan para kepala pribumi maupun dengan rakyat bawahannya.

Tindakan keras yang dilakukan oleh Knoerle ini juga mendapat kecaman dari Francis, pengganti sementara setelah kematian Knoerle. Menurut Francis, penghapusan lembaga adat daerah, seperti penghapusan gelar kepangeranan, serta hak-hak tradisional para kepala pribumi di Bengkulu, tidak hanya memutuskan ikatan pemerintahan tradisional dengan pemerintah Belanda, tetapi juga akan menimbulkan gejolak sosial. Selanjutnya, Francis juga memberikan komentarnya mengenai penyebab terbunuhnya Asisten Residen Knoerle. Dikatakan, bahwa

akibat tindakannya yang terburu-buru itu telah menimbulkan berbagai macam persoalan yang dihadapinya, sehingga Knoerle harus menebus dengan nyawanya. Posisi para kepala pribumi dan anak keturunannya justru semakin tertekan kehidupan tradisionalnya. Intervensi yang terlalu mendalam dalam kehidupan tradisional para kepala pribumi telah menimbulkan sikap antipati. Sikap antipati para kepala pribumi ini jelas sangat merugikan pemerintah kolonial Belanda dalam rangka eksploitasinya.

Akibat intervensi yang terlalu mendalam terhadap kehidupan tradisional para kepala pribumi serta tindakan yang sewenang-wenang itulah yang diduga kuat telah membawa kematian Knoerle. Peristiwa terbunuhnya Asisten Residen Knoerle ini telah mengundang perhatian serius pemerintah pusat Batavia. Komisaris Jendral Van den Bosch selaku peletak dasar dari sistem tanam paksa pun datang ke Bengkulu untuk mempelajari kasus itu. Setelah dipelajari dengan seksama, akhirnya diputuskan untuk tidak akan mengambil tindakan yang keras terhadap para kepala pribumi dan rakyatnya yang telah terlibat dalam pembunuhan itu. Sebaliknya, van den Bosch menyarankan agar para pegawai Eropa lebih berhati-hati serta bersikap lunak terhadap para kepala pribumi dan penduduk Bengkulu.

Dalam tahun 1835, telah terjadi dua kali peristiwa perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pertama, terjadi pada bulan Mei, rakyat disekitar dusun Tertik telah menghancurkan pos keamanan Belanda yang ada di susun Keban. Perlawanan rakyat terus berlanjut hingga bulan Juni. Sikap anti-pati Radja Malio (Depati Tjinta Mandi) dapat diketahui melalui isi suratnya yang ditujukan

kepada Depati Tanjung Erang dan Proatin Benkoeloe Sabha Boekit serta anak-buahnya yang ditulis pada tanggal 26 Juni 1835. Isi suratnya menganjurkan agar tidak bekerja-sama dengan pemerintah kolonial Belanda terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja (kuli). Tampaknya anjuran itu cukup serius karena disertai dengan ancaman, bahwa apabila ada diantara mereka yang masih bekerja-sama dengan Belanda, maka akan bermusuhan dengan Depati Tjinta Mandi yang sudah bersepakat dengan para proatin lainnya.

Sistem kontrol langsung yang dilakukan oleh para ambtenar Belanda tidak saja dapat menimbulkan sikap antipati para kepala pribumi, tetapi juga dapat menimbulkan anti-pati spontan dari penduduk pribumi yang tidak suka ditekan kebebasannya. Insiden terbunuhnya seorang gezag-hebber (penguasa) di Selumah oleh orang-orang Pasyemah yang terkenal sifat kerasnya merupakan salah satu bukti anti-pati spontan penduduk pribumi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Insiden yang menewaskan Tuan Boss itu terjadi pada tanggal 28 Juni 1835, ketika orang-orang Pasyemah yang akan pergi ke Bengkulu (ibukota) ditahan di perjalannya oleh Tuan Boss dan akan dirampas senjata mereka.

Orang-orang Pasyemah memang terkenal sangat keras sejak zaman Inggris di Bengkulu. Sebagai kelompok preman mereka tidak mempunyai pekerjaan selain sebagai pencuri, penyamun, dan perampok yang selalu disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tidak segan-segan melakukan pembunuhan terhadap siapapun yang dianggap menghalanginya. Menurut laporan para kepala pribumi di Selumah, orang-orang Pasyemah di samping telah membunuh Tuan Boss, juga telah merusak dan menyerbu beberapa dusun di Distrik Selumah dan Distrik

Tallo. Tindakan brutal yang dilakukan oleh orang-orang Pasyemah itu tidak hanya menimbulkan rasa takut di kalangan pejabat birokrat kolonial saja, tetapi juga di kalangan kepala pribumi dan penduduk pribumi lainnya.

Perlawanan rakyat pegunungan suku Rejang terhadap Belanda telah terjadi pada tahun 1838, yang mengakibatkan terbunuhnya Asisten Residen Boogard. Perlawanan rakyat suku Rejang terus berlanjut hingga tahun 1857. Perlawanan rakyat dari dusun Tumadak, Tertik, Taba Padang, dan Kelilik juga mengakibatkan tewasnya seorang kapten Belanda yang bernama Deleau yang dikenal angkuh bahkan melecehkan penduduk, terutama para kepala dusunnya (Ginde). Disinyalir tokoh yang berada dibalik peristiwa Tumadak diketahui bernama Rajo Alam, Ginde Sebetok, dan Ginde Ubei.

Kebijakan politik kolonial Belanda tentang penerapan sistem pajak kepala “hoodfbelasting” dianggap sebagai pemicu utama timbulnya perlawanan rakyat. Namun demikian, kebijakan politik kolonial Belanda sebelumnya juga mempunyai andil yang cukup penting dalam memicu gerakan perlawanan anti penjajah.

Penghapusan “regentenbestuur” (pemerintahan bupati) telah mengakibatkan sikap antipati para elite pribumi Bengkulu. Seperti yang terjadi pada Pangeran Muhamad Syah II dari wilayah Sungai Lemau yang telah dibebaskan tugas dari jabatan regent secara resmi melalui Surat Keputusan Pemerintah tertanggal 5 Desember 1861 La Me yang sifatnya rahasia. Pada tanggal 25 Desember 1862, Pangeran Bangsa Negara juga telah dibebastugaskan dari jabatan Regent Sungai Itam melalui Surat Keputusan Pemerintah tertanggal 25 Desember 1862, Surat

Rahasia La K. Jabatan Regent Sungai Itam itu tetap dibiarkan kosong, hingga Pangeran Bangsa Negara sendiri telah meninggal pada tanggal 6 Januari 1863. Sultan Takdir Kalipa Tullah Syah. Sultan Muko-Muko pun telah dibebastugaskan dari jabatan regent melalui surat Keputusan Pemerintah Hindia - Belanda tertanggal 22 April 1870, nomor. 41.

Dalam tahun 1873, setidaknya tercatat ada dua peristiwa perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan rakyat dari dusun Tanjung Terdana pada bulan April yang dimotori oleh Burniat dan Meradayan nyaris melumpuhkan pusat pemerintahan kolonial Belanda di Fort Marlborough bahkan nyaris mengancam nyawa Asisten Residen H.C. Humme. Munculnya perlawanan rakyat Tanjung Terdana, selain dipicu oleh pajak kepala "hoofdbelasting" juga karena kebijakan penghapusan "regenten bestuur" Menurut sebuah sumber, peristiwa penyerangan tersebut dilakukan pada tanggal 18 April 1873.

Demikian juga perlawanan rakyat dari Bintunan yang dipelopori oleh pasirah Mardjati yang lebih dikenal dengan nama Ratu Samban. Menurut catatan sejarah, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 September 1873 yang menewaskan Asisten Residen Vam Amstel dan Controleur E.F.W. Castens.

REFERENSI

- Dinas P dan K, 1982. *Sejarah Kota Bengkulu*. Jakarta: IDSN. Dikbud.
- . 1982/1983. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperealisme di daerah Bengkulu*. Jakarta: Proyek IDSN.
- . 1984. *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional*. Jakarta: IDSN. Dikbud.
- . 1998. *Pemanfaatan Bangunan Peninggalan Bersejarah Sebagai asset Wisata Daerah Bengkulu*. Jakarta: IDSN. Dikbud.
- Setiyanto, Agus. 2001. *Elite Pribumi Bengkulu Perspektif Sejarah Abad Ke-19*. Balai Pustaka. Jakarta
- Burhan, Firdaus. 1988. *Bengkulu Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Seni dan Budaya Nasional Indonesia.